



Kasus Pengadaan Kapal Penyidik Gandeng Ahli BKI

PENANGANAN kasus dugaan penyimpangan pengadaan kapal ikan untuk nelayan di Buleleng yang pagu anggarannya Rp 10 miliar lebih, berjalan lambat. Penyidik Pidsus Kejati Bali sejatinya tinggal selangkah lagi menetapkan tersangka, yakni dari keterangan ahli. Namun, ahli yang diharapkan tidak kunjung datang. Salah satunya adalah ahli dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya).

Walau gagal menghadirkan ahli ITS, penyidik akhirnya mengalihkan ke ahli lain. Kali ini yang diminta sebagai ahli adalah BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Jakarta. Aspidsus Kejati Bali Polin O. Sitanggang didampingi Kasi Penuntutan Wayan Suardi, Kamis (10/11) kemarin, membenarkan kedatangan ahli dari BKI. "Untuk ITS tidak jadi. Sekarang dari BKI," katanya.

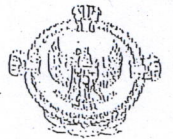
Dikatakannya, didatangkannya BKI ini untuk mengecek langsung keberadaan fisik kapal. Sebelumnya, pihak kejaksaan sempat mengecek posisi kapal, yang ternyata sudah pindah hingga ke wilayah Sumberkima, Buleleng. Rencananya, pemeriksaan fisik akan dilakukan Jumat (11/11) hari ini, karena pemeriksaan fisik diperkirakan berlangsung cukup lama. "Satu kapal bisa diperiksa satu jam. Ini masalah fisik," jelas Suardi.

Ditanya nama ahli, baik Polin O. Sitanggang maupun Wayan Suardi belum mau membuka. Dalihnya, biar pemeriksaan di lapangan nanti berjalan cepat, aman dan tidak terjadi hambatan karena pemeriksaan ini diperkirakan ribet. "Yang jelas ada dua orang dari BKI. Soal nama, jangan dulu ya," pintanya.

Sebelumnya, Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan mengatakan bahwa pemeriksaan ahli ini juga dijadikan acuan untuk melakukan ekspos. Setelah ekspos bersama pimpinan, baru dilakukan langkah selanjutnya. Untuk pemeriksaan tingkat lokal, yakni Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, dirasa sudah cukup karena semua elemen yang terlibat dalam pengadaan kapal ikan ini sudah dilakukan BAP. (asa)

Edisi : Jumat, 11 Nov 2016

Hal : 2



Imbas Kasus Korupsi Aspal Perbaiki Jalan di Banjar Pande Mangkrak

Gianyar (Bali Post) -

Jalan menuju Pura Masceti di Banjar Pande Desa Tulikup hingga kini masih dalam kondisi rusak berat. Padahal jalan tersebut sempat hendak diaspal tahun 2014 lalu. Namun karena terjadi kasus korupsi yang melibatkan kontraktor, hingga kini proyek tersebut tidak bisa terealisasi.

Berdasarkan pantauan, Kamis (10/11) kemarin, di beberapa titik jalan menuju Pura Masceti di Banjar Pande, sudah banyak yang berlubang. Di beberapa titik jalan juga tampak tertimbun tanah. Kondisi ini cukup meresahkan warga, lantaran saat hujan jalanan tersebut menjadi licin.

Klian Dinas Banjar Pande, Nyoman Murna, menjelaskan, jalan rusak menuju Pura Masceti memiliki panjang sekitar 500 meter. Selain akses menuju Beji Masceti, jalan tersebut juga menjadi akses petani membawa hasil panen. Namun akibat kondisi yang rusak berat ini, beberapa kali terjadi kecelakaan di jalur tersebut sehingga warga pun banyak mengeluh.

"Kecelakaan itu sudah sering terjadi. Nah kemudian kalau ada petani yang membawa telur bebek dari sawah, pasti telurnya pecah setelah melintas di jalan itu, karena kerasnya guncangan," katanya.

Dijelaskannya, kini pihaknya sudah mengajukan rancangan pembangunan ke tingkat desa. Diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk pengaspalan Rp 250 juta. "Kalau pemda mau bantu, dana yang dibutuhkan Rp 250 juta untuk pengaspalan. Kalau ditambah pembuatan gorong-gorong, tidak lebih dari Rp 300 juta," tandasnya.

Untuk diketahui, kasus korupsi aspal diungkap Satuan Reskrim Polres Gianyar. Kasus ini berawal dari Dinas PU Provinsi Bali yang memberikan bantuan 30 drum aspal ke banjar setempat pada 2013. Permohonan aspal ini diajukan tahun 2012 oleh Klian Dinas Banjar Pande saat itu, I Nyoman Sukara, pada 2012. Lalu terealisasi pada 2013 dan diterima Klian Dinas periode selanjutnya, I Nyoman Murna. Bila diuangkan, 30 drum aspal dari Dinas PU Provinsi Bali itu senilai Rp 47.211.450.

Selain 30 drum aspal, pada

November 2014 juga ada Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Gianyar sebesar Rp 25 juta. Selanjutnya pada bulan yang sama diadakan rapat di Banjar Pande untuk membahas upaya pengaspalan dengan menggunakan ADD dan aspal 30 drum tersebut. Lalu disepakati proyek dilaksanakan oleh kontraktor yang mana Komang Sukerta saat itu mengaku sebagai Direktur CV Luhur Puncak Sari.

Dari kesepakatan itu, ADD sebesar Rp 25 juta digunakan sebagai pembayaran di muka kepada kontraktor ditambah 30 drum aspal. Namun hingga Maret 2015, pengerjaan tidak kunjung dilaksanakan. Akhirnya, pihak banjar kembali rapat dan membuat surat kesepakatan dengan Komang Sukerta. Hingga akhir April 2015, kontraktor hanya melakukan pembuatan gregat, yakni sebatas pemasangan batu kerikil pada jalan yang rusak. (kmb35)

Edisi : Jumat, 11 Nov 2016

Hal : 9